



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
KLATEN

PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. MUCH NASIR, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Hj. SRI MULYANI, S.M  
Jabatan : Bupati Klaten

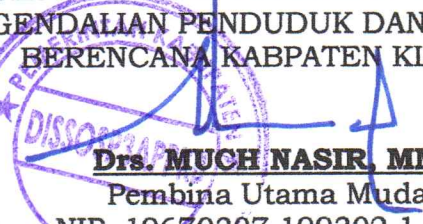
Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
BUPATI KLATEN  
  
Hj. SRI MULYANI, S.M

Pihak Kesatu  
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KLATEN  
  
Drs. MUCH NASIR, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670307 199302-1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Target |
|----|---|---|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan | a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | %      | 66     |
| 2  | Meningkatnya Nilai dimensi prasyarat PUG  | a. Nilai Dimensi Prasyarat PUG                    | %      | 80     |
| 3  | Meningkatnya Nilai dimensi pelaksanaan PUG  | a. Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG                  | %      | 45     |
| 4  | Menurunnya angka kelahiran  | a. Total Fertility Rate (TFR)                     | %      | 2      |

| NO. | PROGRAM  | ANGGARAN                 | KETERANGAN   |
|-----|--|--------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                        | 4  |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 6.961.041.191,00         | APBD II  |
| 2   | Program Pemberdayaan Sosial                                  | 1.175.850.000,00         | APBD II  |
| 3   | Program Rehabilitasi Sosial                                  | 1.294.517.000,00         | APBD II  |
| 4   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                      | 413.750.000,00           | APBD II  |
| 5   | Program Penanganan Bencana                                   | 200.275.000,00           | APBD II  |
| 6   | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                     | 69.000.000,00            | APBD II  |
| 7   | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan    | 77.450.000,00            | APBD II  |
| 8   | Program Perlindungan Perempuan                               | 10.000.000,00            | APBD II  |
| 9   | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                        | 111.000.000,00           | APBD II  |
| 10  | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak              | 10.000.000,00            | APBD II  |
| 11  | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                             | 245.800.000,00           | APBD II  |
| 12  | Program Perlindungan Khusus Anak                             | 15.000.000,00            | APBD II  |
| 13  | Program Program Pengendalian Penduduk                        | 672.670.000,00           | APBD II, DAK Non Fisik BOKB  |
| 14  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    | 7.899.345.000,00         | APBD II, DAK Fisik Reguler Sub Bidang Keluarga Berencana, DAK Non Fisik BOKB |
| 15  | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 6.657.800.000,00         | APBD II, DAK Non Fisik BOKB  |
|     | <b>Jumlah</b>  | <b>25.813.498.191,00</b> | APBD II, DAK Fisik Reguler Sub Bidang Keluarga Berencana, DAK Non Fisik BOKB |



Kepala Dinas  
 Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Klaten





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOENANTO SINUNG NOEGROHO, ST, M.SE  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Drs. MUCH NASIR, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

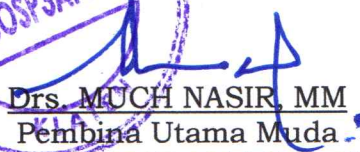
Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk Dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Drs. MUCH NASIR, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 19670307 199302 1 002

Pihak Kesatu  
Sekretaris  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
YOENANTO SINUNG NOEGROHO, ST, M. SE  
Pembina Tk I  
NIP 19700213 199803 1 005

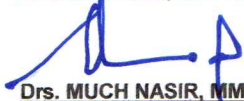
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sekretariat

| No | Program   | Indikator Kinerja   | Target |
|----|---|---|--------|
| 1  | 2   | 3   | 4      |
| 1  | <b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</b>      |   |        |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun         | 100%   |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | 100%   |
| 3  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu                     | 100%   |
| 4  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | 100%   |
| 5  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat          | 100%   |
| 6  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara    | 100%   |

| PROGRAM/ KEGIATAN   |           | ANGGARAN                | KETERANGAN |
|---|-----------|-------------------------|------------|
| 1 <b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</b>      | Rp        | <b>6.961.041.191,00</b> | APBD       |
| 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Rp        | 150.000.000,00          | APBD       |
| 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Rp        | 5.448.675.808,00        | APBD       |
| 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Rp        | 229.300.000,00          | APBD       |
| 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Rp        | 208.500.000,00          | APBD       |
| 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Rp        | 440.565.383,00          | APBD       |
| 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp        | 484.000.000,00          | APBD       |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp</b> | <b>6.961.041.191,00</b> |            |

Pihak Kedua  
Kepala Dinas  
Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

  
**Drs. MUCH NASIR, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19670307 199302 1 002

Pihak Kesatu  
Sekretaris  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

  
**YOENANTO SINUNG N, ST, M.SE**  
Pembina Tk I  
NIP 19700213 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
KLATEN

PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. HARI SUROSO, MPHR  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Drs. MUCH NASIR, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten


Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

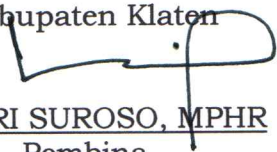
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Drs. MUCH NASIR, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670307 199302 1 002

Pihak Kesatu  
Kepala Bidang Pemberdayaan  
Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dinas  
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Ir. HARI SUROSO, MPHR  
Pembina  
NIP. 19680911 199401 1 001

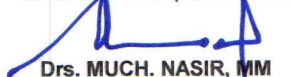
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Unit Kerja : Bidang Dayalijamsos


| No  | Program   | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1   | 2   | 3  | 4      |
| I   | Program Pemberdayaan Sosial   |  |        |
| 1   | Kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota       | Persentase PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya             | 98%    |
| II  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   |  |        |
| 1   | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota                  | Persentase PMKS Fakir Miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial | 80%    |
| III | Program Penanganan Bencana  |  |        |
| 1   | Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.                    | Persentase korban bencana yang telah mendapat bantuan perlindungan sosial          | 31%    |
| 2   | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Taruna Siaga yang diberdayakan  | 80%    |
| IV  | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan  |  |        |
| 1   | Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota.                            | Persentase sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi               | 32%    |

| No. | Program  | Anggaran           | Keterangan |
|-----|--|--------------------|------------|
| I   | Program Pemberdayaan Sosial<br>Kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota   | : Rp 1.175.850.000 | APBD       |
| II  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | : Rp 413.750.000   | APBD       |
| III | Program Penanganan Bencana<br>Kegiatan Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.<br>Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota | : Rp 200.275.000   | APBD       |
| IV  | Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan<br>Kegiatan Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota.  | : Rp 69.000.000    | APBD       |
|     |  | Rp 1.858.875.000   |            |

Pihak Kedua  
Kepala Dinas  
Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

  
**Drs. MUCH. NASIR, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670307 199302 1 002

Pihak Pertama  
Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Jaminan Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

  
**Ir. HARI SUROSO, MPHR**  
Pembina  
NIP. 19680911 199411 001



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ISMAIL PARTAMA, M.Pd  
Jabatan : Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Drs. MUCH NASIR, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Drs. MUCH NASIR, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670307 199302 1 002

Pihak Kesatu

Kepala Bidang Reahabilitasi Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Drs. ISMAIL PARTAMA, M.Pd  
Pembina  
NIP 19660413 199203 1 008

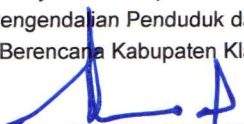
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Unit Kerja : Bidang Rehabilitasi Sosial


| No | Program  | Indikator Kinerja  | Target |
|----|--|--|--------|
| 1  | 2  | 3  | 4      |
| I  | Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan   |  |        |
| 1  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial. | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti              | 30%    |
| 2  | Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial                    | Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 35%    |

| No. | Program   | Anggaran                  | Keterangan |
|-----|---|---------------------------|------------|
| 1   | Program Rehabilitasi Sosial   | : <b>Rp 1.294.517.000</b> | APBD       |
|     | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial. | Rp 1.008.511.000          | APBD       |
|     | Kegiatan rehabilitasi Sosial Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial                    | : Rp 286.006.000          | APBD       |
|     | <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp 1.294.517.000</b>   |            |

Pihak Kedua  
Kepala Dinas  
Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Klaten

  
**Drs. MUCH NASIR, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19670307 199302 1 002

Pihak Pertama  
Kepala Rehabilitasi Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
**Drs. ISMAIL PARTAMA, M.Pd**  
Pembina  
NIP 19660413 199203 1 008





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWANI, SH,MH  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Drs. MUCH NASIR, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua

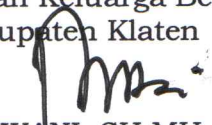
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk Dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Drs. MUCH NASIR, MM  
Pembina Utama Muda

NIP 19670307 199302 1 002

Pihak Kesatu

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak,  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
PURWANI, SH,MH  
Pembina

NIP 19671103 199203 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

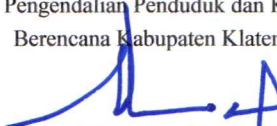
Unit Kerja : Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No  | Program   | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1   | 2   | 3  | 4      |
| I   | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan   |  |        |
| 1   | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Persentase perangkat daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran  | 75%    |
| 2   | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Persentase organisasi kemasyarakatan aktif dalam Pemberdayaan Perempuan  | 32%    |
| 3   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                        | Persentase lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang aktif  | 30%    |
| II  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  |  |        |
| 1   | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota    | Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten /Kota yang tertangani sesuai standar | 100%   |
| III | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA   |  |        |
|     | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            | Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | 35%    |
| IV  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK   |  |        |
| 1   | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase OPD yang menyajikan data gender dan anak  | 55%    |
| V   | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  |  |        |
| 1   | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Persentase OPD, Ormas/LSM/PT, dunia usaha yang telah melaksanakan kegiatan responsif PUHA  | 30%    |
|     | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota               | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan                   | 65%    |
| VI  | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  |  |        |
|     | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                 | Persentase Sekolah Ramah Anak ( Mempunyai Kebijakan anti kekerasan di Sekolah)   | 32%    |

| Program   | Anggaran  | Keterangan         |
|---|-----------|--------------------|
| <b>I</b> Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan  | <b>Rp</b> | <b>107.200.000</b> |
| 1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | : Rp      | 77.450.000 APBD    |
| 2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan                            | : Rp      | 24.750.000 APBD    |
| 3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                        | : Rp      | 5.000.000 APBD     |
| <b>II</b> PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  | <b>Rp</b> | <b>10.000.000</b>  |
| 1 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota    | : Rp      | 10.000.000 APBD    |
| <b>III</b> PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA  | <b>Rp</b> | <b>111.000.000</b> |
| 1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            | : Rp      | 111.000.000 APBD   |
| <b>IV</b> PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK   | <b>Rp</b> | <b>10.000.000</b>  |
| 1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | : Rp      | 10.000.000 APBD    |
| <b>V</b> PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)   | <b>Rp</b> | <b>260.000.000</b> |
| 1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                           | : Rp      | 153.000.000 APBD   |
| 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota               | : Rp      | 92.800.000 APBD    |
| <b>VI</b> PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  | <b>Rp</b> | <b>15.000.000</b>  |
| 1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                 | : Rp      | 15.000.000 APBD    |
|   | <b>Rp</b> | <b>513.200.000</b> |

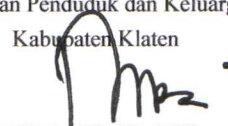
**Pihak Kedua**

Kepala Dinas  
 Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
 Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
 Berencana Kabupaten Klaten

  
Drs. MUCH. NASIR, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670307 199302 1 002

**Pihak Pertama**

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
 Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Klaten

  
PURWANI, SH, MH  
 Pembina  
 NIP. 19671103 199203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. NURYANTI, SKM  
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Drs. MUCH NASIR, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten


Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Drs. MUCH NASIR, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 19670307 199302 1 002

Pihak Kesatu  
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Hj. NURYANTI, SKM  
Penata Tk. I  
NIP 19671112 198703 2 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Unit Kerja : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No  | Program  | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|--|--|--------|
| 1   | 2  | 3  | 4      |
| I   | <b>Program Pengendalian Penduduk</b>   |  |        |
| 1   | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                | Persentase kesesuaian kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 85%    |
| 2   | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Dokumen Data kependudukan dan KB tersusun   | 100%   |
| II  | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   |  |        |
| 1   | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal  | Persentase kecamatan yang dilakukan Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)  | 100%   |
| 2   | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  | Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdayaguna   | 100%   |
| 3   | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP   | 43%    |
| 4   | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                        | Cakupan Kampung KB yang dilakukan pembinaan  | 82%    |
| III | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>  |  |        |
| 1   | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina   | 75%    |
| 2   | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | presentase linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKS   | 40%    |

**Program**

I **Program Pengendalian Penduduk**

**Anggaran**

: Rp

**672.670.000**

**Keterangan**

1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

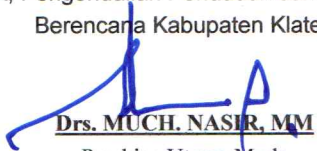
: Rp

5.000.000

APBD

|               |  |   |           |                       |                         |
|---------------|--|---|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 2             | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | : | Rp        | 667.670.000           | APBD                    |
| II            | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)  | : | Rp        | 7.899.345.000         | DAK Fisik dan Non Fisik |
| 1             | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal  | : | Rp        | 1.038.318.000         | DAK Fisik dan Non Fisik |
| 2             | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  | : | Rp        | 1.502.600.000         | DAK Fisik dan Non Fisik |
| 3             | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota   | : | Rp        | 4.295.427.000         | DAK Fisik dan Non Fisik |
| 4             | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                        | : | Rp        | 1.063.000.000         | DAK Fisik dan Non Fisik |
| III           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)   | : | <b>Rp</b> | <b>6.657.800.000</b>  |                         |
| 1             | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | : | Rp        | 6.651.800.000         | DAK Fisik dan Non Fisik |
| 2             | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | : | Rp        | 6.000.000             | APBD                    |
| <b>JUMLAH</b> |  |   | <b>Rp</b> | <b>15.229.815.000</b> |                         |

Pihak Kedua  
Kepala Dinas  
Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Klaten

  
**Drs. MUCH. NASIR, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670307 199302 1 002

Pihak Pertama  
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
**Hj. NURYANTI SKM,**  
Penata Tk I  
NIP. 19671112198703 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
KLATEN

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI MARYANTI, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : YOENANTO SINUNG NOEGROHO, ST, M.SE

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua

Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Klaten

YOENANTO SINUNG N. ST, M.SE

Pembina Tk I

NIP. 19700213 199803 1 005

Pihak Kesatu

Kepala Sub Bagian Umum Dan  
Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Klaten

SRI MARYANTI, S.Sos,MM

Penata

NIP. 19750401 199603 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TA. 2023**

Unit Kerja : Sekretariat

| No | Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target        |
|----|---|--|---------------|
| 1  | 2   | 3  | 4             |
| 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia                              | 5 Unit        |
| 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia  | 970 Unit      |
| 3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia   | 4 Unit        |
| 4  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia   | 200 Eksemplar |
| 5  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia                                      | 24 Eksemplar  |
| 6  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi  | 48 Kali       |
| 7  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 214 Kali      |
| 8  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan                      | 6 Unit        |
| 9  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Surat Terkirim  | 300 Eksemplar |
| 10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar   | 12 Bulan      |
| 11 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar  | 11 orang      |
| 12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar | 40 Unit       |
| 13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terpelihara/terrehabilitasi                              | 3 Unit        |
| 14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya rehabilitasi/terpelihara           | 5 Unit        |

| Kegiatan   | Anggaran                | Keterangan |
|--|-------------------------|------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   |                         |            |
| 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Rp 5.300.000            | APBD       |
| 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Rp 55.000.000           | APBD       |
| 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Rp 5.000.000            | APBD       |
| 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Rp 27.000.000           | APBD       |
| 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | Rp 2.000.000            | APBD       |
| 6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Rp 60.000.000           | APBD       |
| 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Rp 75.000.000           | APBD       |
| 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Rp 1.210.000            | APBD       |
| 9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Rp 1.700.000            | APBD       |
| 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Rp 90.000.000           | APBD       |
| 11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Rp 348.865.383          | APBD       |
| 12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 214.000.000          | APBD       |
| 13 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Rp 200.000.000          | APBD       |
| 14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Rp 70.000.000           | APBD       |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp 1.155.075.383</b> |            |

Pihak Kedua  
 Sekretaris  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Klaten

**YOENANTO SINUNG N., ST, M.SE**  
 Pembina Tk I

NIP.19700213 199803 1 005

Pihak Kesatu  
 Kepala Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
 Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Klaten

**SRI MARYANTI, S.SOS, MM**  
 Penata

NIP.19750401 199603 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI PURNOMO, ST, MM  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : YOENANTO SINUNG NOEGROHO, ST, M.SE  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

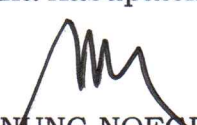
Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

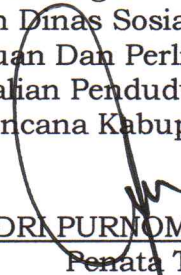
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Klaten

  
YOENANTO SINUNG NOEGROHO, ST, M. SE  
Pembina Tk I  
NIP. 19700213 199803 1 005

Pihak Kesatu  
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan  
Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Klaten

  
ANDRI PURNOMO, ST, MM  
Penata Tk I  
NIP. 19760903 201001 1 009

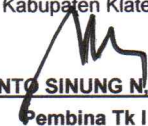
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TA. 2023**

Unit Kerja : Sekretariat

| No | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    | Target    |
|----|--|--|-----------|
| 1  | 2  | 3  | 4         |
| 1  | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranagkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun | 9 Dokumen |

| KEGIATAN   | ANGGARAN       | KETERANGAN |
|--|----------------|------------|
| 1 Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranagkat Daerah | Rp 150.000.000 | APBD       |

Pihak Kedua  
 Sekretaris  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
 Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Klaten

  
**YOENANTO SINUNG N. ST, M.SE**  
 Pembina Tk I  
 NIP. 19700213 199803 1 005

Pihak Kesatu  
 Kepala Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
 Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Klaten

  
**ANDRI PURNOMO, ST,MM**  
 Penata Tk I  
 NIP. 19760903 201001 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUYANTA, SH  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : YOENANTO SINUNG NOEGROHO, ST, M.SE  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten


Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Klaten

  
YOENANTO SINUNG N, ST, M.SE  
Pembina Tk I  
NIP 19700213 199803 1 005

Pihak Kesatu  
Kepala Sub Bagian Keuangan  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
SUYANTA, SH  
Penata Tk I  
NIP 19680618 198903 1 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TA. 2023**

Unit Kerja : Sekretariat

| No | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                     | Target     |
|----|--|---|------------|
| 1  | 2  | 3   | 4          |
| 1  | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN  | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji                      | 45 orang   |
| 2  | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD                  | Tersusunya laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD          | 1 Dokumen  |
| 3  | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulan semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | 12 Dokumen |

| KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | ANGGARAN                   | KETERANGAN |
|--|----------------------------|------------|
| 1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN  | Rp 5.438.675.808,00        | APBD       |
| 2 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD                  | Rp 5.000.000,00            | APBD       |
| 3 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulan semesteran SKPD | Rp 5.000.000,00            | APBD       |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>Rp 5.448.675.808,00</b> |            |

Pihak Kedua  
 Sekretaris  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
 Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Klaten

**YOENANTO SINUNG N, ST, M.SE**

Pembina Tk I  
 NIP. 19700213 199803 1 005

Pihak Kesatu  
 Kepala Sub.Bag Keuangan  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
 Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Klaten

**SUYANTA, SH**

Penata Tk I  
 NIP. 19680618 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA  
SUB. KOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI PRATOMO, S.ST  
Jabatan : Sub. Koordinator Perlindungan Dan Jaminan Sosial,  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten  
Selanjutnya disebut pihak kesatu

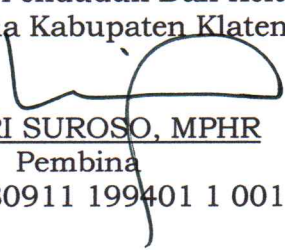
Nama : Ir. HARI SUROSO, MPHR  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten  
Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pemberdayaan,  
Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Klaten

  
Ir. HARI SUROSO, MPHR  
Pembina  
NIP 19680911 199401 1 001

Pihak Kesatu  
Sub. Koordinator Perlindungan  
Dan Jaminan Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
HERI PRATOMO, S.ST  
Penata Tk I  
NIP 19780526201001 1 012

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TH. 2023**

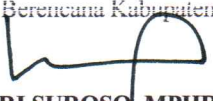
Unit Kerja : Bidang Dayalijamsos (Lijamsos)

| No | Program  | Indikator Kinerja  | Target           |
|----|--|--|------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                |
| I  | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial  |  |                  |
|    | Keg. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                           | Persentase PMKS Fakir Miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial   |                  |
| 1  | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah keluarga miskin yang terverifikasi dan validasi                               | 210.000 Keluarga |
| 2  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                | jumlah desa yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 260 desa         |
| 3  | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial   | 60.000 Keluarga  |
| 4  | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat   | Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi                              | 20 lembaga       |
| II | PROGRAM PENANGANAN BENCANA   |  |                  |
|    | Keg. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     | Persentase korban bencana yang telah mendapat bantuan perlindungan sosial            |                  |
| 1  | Penyediaan Makanan   | Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan                                       | 230 Orang        |
| 2  | Penyediaan Sandang   | Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang                                    | 230 Orang        |
| 3  | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi  | Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki                                    | 10 unit          |
| 4  | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan   | Jumlah kelompok rentan yang mendapatkan bantuan sosial/penanganan khusus             | 230 Orang        |
| 5  | Pelayanan Dukungan Psikososial   | Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial                   | 230 Orang        |
|    | Keg. Penyeienggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Taruna Siaga yang diberdayakan  |                  |
| 1  | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                               | Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan  | 50 Orang         |

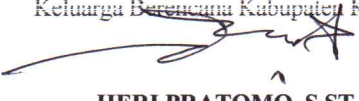
| Kegiatan   | Anggaran Rp        | Keterangan       |
|--|--------------------|------------------|
| I Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                              | <b>413.750.000</b> |                  |
| Keg. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota       | Rp                 | 413.750.000      |
| 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                 | Rp                 | 80.000.000 APBD  |
| 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota          | Rp                 | 95.750.000 APBD  |
| 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                     | Rp                 | 213.000.000 APBD |
| 4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                   | Rp                 | 25.000.000 APBD  |
| II PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | <b>200.275.000</b> |                  |
| Keg. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Rp                 | 200.275.000      |
| 1 Penyediaan Makanan   | Rp                 | 30.000.000 APBD  |
| 2 Penyediaan Sandang   | Rp                 | 30.000.000 APBD  |
| 3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                              | Rp                 | 30.000.000 APBD  |
| 4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                               | Rp                 | 67.000.000 APBD  |
| 5 Pelayanan Dukungan Psikososial                                       | Rp                 | 20.000.000 APBD  |

|   |  |           |                    |      |
|---|--|-----------|--------------------|------|
|   | Keg. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Rp        | 23.275.000         |      |
| 1 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                               | Rp        | 23.275.000         | APBD |
|   | Jumlah   | <b>Rp</b> | <b>614.025.000</b> |      |

Pihak Kedua  
 Kepala Bidang Dayalijamsos  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan  
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
 Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

  
**Ir. HARI SUROSO, MPHR**  
 Pembina  
 NIP 19680911 199401 1 001

Pihak Pertama  
 Sub. Koordinator Perlindungan Jaminan Sosial  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan  
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan  
 Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

  
**HERI PRATOMO, S.ST**  
 Penata Tk I  
 NIP 19780526201001 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA

SUBKOORDINATOR PEMBEDAYAAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUBANDI, SAP  
Jabatan : Sub. Koordinator Pembedayaan Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Ir. HARI SUROSO, MPHR  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Pelindungan, dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten


Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pemberdayaan  
Pelindungan, dan Jaminan Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan  
Anak, Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Ir. HARI SUROSO, MPHR  
Pembina  
NIP. 19680911 199401 1 001

Pihak Kesatu  
Sub. Koordinator Pembedayaan Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
SUBANDI, SAP  
Pembina Tk I  
NIP 19640209 199103 1 005



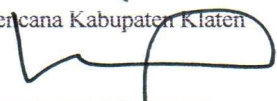
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023**

Unit Kerja : Bidang Dayalijamsos (Sub. Koordinator Pembedayaan Sosial)

| No | Program  | Indikator Kinerja  | Target    |
|----|--|--|-----------|
| 1  | 2  | 3  | 4         |
| I  | <b>Program Pemberdayaan Sosial</b>   |  |           |
| 1  | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Jumlah TKSK yang mendapatkan peningkatan kapasitas   | 26 orang  |
| 2  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas   | 6 lembaga |
| 3  | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    | Jumlah SDM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan kapasitas | 5 orang   |
| II | <b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>  |  |           |
| 1  | Rchabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi                               | 4 Unit    |
| 2  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  | Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang dipelihara                                   | 4 Unit    |

| Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran         | Keterangan |
|--|------------------|------------|
| I Program Pemberdayaan Sosial  | Rp 1.175.850.000 |            |
| 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Rp 647.000.000   | APBD       |
| 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp 507.850.000   | APBD       |
| 3 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    | Rp 21.000.000    | APBD       |
| II Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan  | Rp 69.000.000    |            |
| 1 Rchabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | Rp 24.000.000    | APBD       |
| 2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  | Rp 45.000.000    | APBD       |
| Jumlah   | Rp 1.244.850.000 |            |

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Dayalijamsos  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

  
**Ir. HARI SUROSO, MPHR**  
Pembina  
NIP 19680911 199401 1 001

Pihak Pertama  
Sub. Koordinator Pembedayaan Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

  
**SUBANDI, SAP**  
Pembina Tk I  
NIP 19640209 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA  
SUBKOORDINATOR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN  
SOSIAL LAINNYA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANUNG WIDIATMOKO, SKM  
Jabatan : Sub koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Drs. ISMAIL PARTAMA, M.Pd  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

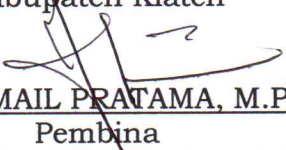
Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan  
Anak, Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Drs. ISMAIL PARTAMA, M.Pd  
Pembina  
NIP 19680911 199401 1 001

Pihak Kesatu  
Sub koordinator Rehabilitasi Sosial  
Penyandang Masalah Kesejahteraan  
Sosial lainnya Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  
Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
ANUNG WIDIATMOKO, SKM  
Pembina  
NIP. 19660413 199203 1 008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TA. 2023**

Unit Kerja : Bidang Rehabilitasi Sosial (Sub koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

| No | Program  | Indikator Kinerja  | Target   |
|----|--|--|----------|
| 1  | 2  | 3  | 4        |
| 1  | <b>Program Rehabilitasi Sosial</b>   |  |          |
|    | Keg. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 35%      |
| 1  | Penyediaan Permakanan  | Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan permakanan  | 50 Orang |
| 2  | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA    | Jumlah PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang mendapat layanan bimbingan sosial              | 50 orang |

| Kegiatan  | Anggaran              | Keterangan |
|---|-----------------------|------------|
| I Program Rehabilitasi Sosial   | <b>Rp 286.006.000</b> |            |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial   | Rp 286.006.000        |            |
| 1 Penyediaan Permakanan   | Rp 17.500.000         | APBD       |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Rp 268.506.000        | APBD       |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp 286.006.000</b> |            |

Pihak Kedua

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

**Drs. Ismail Pratama, M.Pd**

Pembina

NIP. 19680911 19941 1 001

Pihak Pertama

Sub koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

**Anung Widiatmoko, SKM**

Pembina

NIP. 19700530 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA

SUBKOR REHABILITASI SOSIAL ANAK, LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AULI SEPTA ARINI, S.Sos, M.Si

Jabatan : Subkor Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Drs. ISMAIL PARTAMA, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Klaten

Drs. ISMAIL PARTAMA, M.Pd

Pembina

NIP 19680911 199401 1 001

Pihak Kesatu

Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak,  
Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

AULI SEPTA ARINI, S.Sos, M.Si

Penata Muda Tk I

NIP. 19790927 201001 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023**

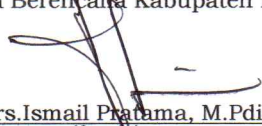
Unit Kerja : Bidang Rehabilitasi Sosial

| No | Program   | Indikator Kinerja  | Target       |
|----|---|--|--------------|
| 1  | 2   | 3  | 4            |
| I  | <b>Program Rehabilitasi Sosial</b>  |  |              |
|    | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti  | 30%          |
| 1  | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jenis disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat yang mendapat bimbingan sosial | 4 Jenis      |
| 2  | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan  | Jumlah lembaga pemberi layanan data dan pengaduan  | 2 Lembaga    |
|    |   | Jumlah keluarga anak rentan yang mendapatkan pelayanan   | 210 Keluarga |
| 3  | Pemberian Layanan Kedaruratan   | Jumlah orang yang diberikan layanan kedaruratan  | 10 Orang     |

| Kegiatan   | Anggaran                | Keterangan |
|--|-------------------------|------------|
| I <b>Program Rehabilitasi Sosial</b>   | <b>Rp 1.008.511.000</b> |            |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Rp 1.008.511.000        | APBD       |
| 1 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta                          | Rp 792.387.000          | APBD       |
| 2 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan   | Rp 201.124.000          |            |
| 3 Pemberian Layanan Kedaruratan  | Rp 15.000.000           | APBD       |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp 1.008.511.000</b> |            |

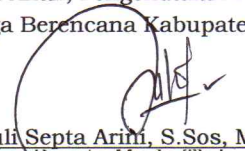
Pihak Kedua

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

  
Drs. Ismail Pratama, M.Pdi  
Pembina  
NIP. 19680911 19941 1 001

Pihak Pertama

Subkor Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan  
Penyandang Disabilitas  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

  
Auli Septa Arini, S.Sos, M.Si  
Penata Muda Tk I  
NIP19790927 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
KLATEN

PERJANJIAN KINERJA  
SUBKOOR PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, PKA DAN PHA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETYOWATI, S.Sos  
Jabatan : Subkoor Perlindungan Hak Perempuan, PKA Dan PHA  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : PURWANI, SH,MH  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

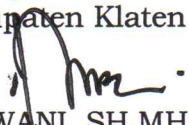
Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
PURWANI, SH,MH  
Pembina

NIP 19671103 199203 2 004

Pihak Kesatu  
Subkoor Perlindungan Hak Perempuan,  
PKA Dan PHA  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
SETYOWATI, S.Sos  
Penata Tk I

NIP 19690114 199603 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN**

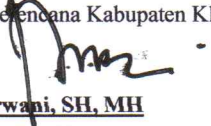
Unit Kerja : Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No  | Program   | Indikator Kinerja   | Target     |
|-----|---|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4          |
| I   | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  |   |            |
|     | Keg. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten /Kota yang tertangani sesuai standar KB | 100%       |
| 1   | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia   | 11 lembaga |
| II  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK   |   |            |
|     | Keg Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | Persentase OPD yang menyajikan data gender dan anak   | 55%        |
| 1   | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah OPD yang memiliki data pilah gender  | 20 OPD     |
| III | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  |   |            |
|     | Keg. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota  | Persentase OPD, Ormas/LSM/PT, dunia usaha yang telah melaksanakan kegiatan responsif PUHA   | 30%        |
| 1   | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah OPD peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak   | 40 OPD     |
| 2   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota   | 40 orang   |
|     | Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan                      | 65 %       |
| 1   | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah frekuensi KIE pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 6 kali     |
| 2   | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 10 lembaga |
| IV  | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  |   |            |
|     | Keg. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Sekolah Ramah Anak ( Mempunyai Kebijakan anti kekerasan di Sekolah)  | 32%        |
| 1   | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Jumlah frekuensi advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota          | 4 kali     |

| Kegiatan  | Anggaran | Keterangan |
|---|----------|------------|
| I PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  | Rp       | 10.000.000 |
| Keg. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp       | 10.000.000 |


|     |  |    |             |      |
|-----|--|----|-------------|------|
| 1   | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Rp | 10.000.000  | APBD |
| II  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK<br>Keg. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | Rp | 10.000.000  |      |
| 1   | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota   | Rp | 10.000.000  | APBD |
| III | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)<br>Keg. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota   | Rp | 245.800.000 |      |
| 1   | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota  | Rp | 123.000.000 | APBD |
| 2   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp | 30.000.000  | APBD |
| 1   | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Rp | 65.800.000  | APBD |
| 2   | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Rp | 27.000.000  | APBD |
| IV  | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK<br>Keg. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | Rp | 15.000.000  |      |
| 1   | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | Rp | 15.000.000  | APBD |
|     | Jumlah   | Rp | 280.800.000 |      |

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten



**Purwani, SH, MH**  
Pembina  
NIP. 19671103 199203 2 004

Pihak Pertama  
Subkooor Perlindungan Hak Perempuan, PKA Dan PHA  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten



**SETYOWATI, S.Sos**  
Pegawai Tk I  
NIP 19690114 199603 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA  
SUBKOOR PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI ASWORO, SIP, MM  
Jabatan : Subkoor Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : PURWANI, SH,MH  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
PURWANI, SH,MH

Pembina

NIP 19671103 199203 2 004

Pihak Kesatu  
Subkoor Peningkatan Kualitas Hidup  
Perempuan Dan Keluarga  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
ADI ASWORO, SIP, MM

Penata Tk I

NIP 19650510 199403 2 008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SATUAN KERJA PERANOKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TH. 2023**

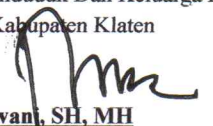
Unit Kerja : Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Program   | Indikator Kinerja   | Target                |
|----|---|---|-----------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                     |
| I  | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  |   |                       |
|    | Keg. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Persentase organisasi kemasyarakatan aktif dalam Pemberdayaan Perempuan   | 75 %                  |
| 1  | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG   | Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG  | 2 kali                |
| 2  | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG   | Jumlah OPD/Kelurahan/Desa yang mengikuti pelatihan PPRG   | 20 OPD                |
|    | Keg. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase organisasi kemasyarakatan aktif dalam Pemberdayaan Perempuan   | 32%                   |
| 1  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                    | Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum                                       | 50 orang              |
|    | Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Persentase lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang aktif   | 30%                   |
| 1  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                     | Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga (managemen kasus) penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota | 10 Orang              |
| II | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA   |   |                       |
|    | Keg. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | 35 %                  |
| 1  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                         | Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan  | 35 orang              |
| 2  | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Jumlah peserta sosialisasi ketahanan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga  | 10 lembaga/organisasi |

| Kegiatan  | Anggaran              | Keterangan |
|---|-----------------------|------------|
| I PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  | <b>Rp 77.450.000</b>  |            |
| Keg. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | <b>Rp 47.700.000</b>  |            |
| 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG   | Rp 25.000.000         | APBD       |
| 2 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG   | Rp 22.700.000         | APBD       |
| Keg. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | <b>Rp 24.750.000</b>  |            |
| 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                  | Rp 24.750.000         | APBD       |
| Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | <b>Rp 5.000.000</b>   | APBD       |
| 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Rp 5.000.000          | APBD       |
| III PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA   | <b>Rp 111.000.000</b> |            |

|   |    |             |      |
|---|----|-------------|------|
| Keg. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 111.000.000 |      |
| 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota             | Rp | 76.000.000  | APBD |
| 2 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Rp | 35.000.000  | APBD |
| Jumlah  | Rp | 188.450.000 |      |

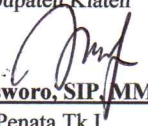
Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Purwan, SH, MH

Pembina

NIP. 19671103 199203 2 004

Pihak Pertama  
Subkoor Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Adi Asworo, SIP, MM

Penata Tk I

NIP 19650510 199403 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SUBKOOR KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI SUNARTI, SKM, M.Si  
Jabatan : Subkoor Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten  
Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Hj. NURYANTI, SKM  
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten  
Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana  
Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Klaten

  
Hj. NURYANTI, SKM

Penata Tk. I

NIP 19671112 198703 2 004

Pihak Kesatu  
Subkoor Keluarga Berencana Ketahanan  
Kesejahteraan Keluarga  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
SRI SUNARTI, SKM, M.Si

Pembina

NIP 19710129 199203 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TA 2023**

Unit Kerja : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Program  | Indikator Kinerja  | Target         |
|----|--|--|----------------|
| 1  | 2  | 3  | 4              |
| I  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)  |  |                |
|    | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal  | Persentase kecamatan yang dilakukan Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)  | 100%           |
| 2  | Pelaksanaan mekanisme operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakocam) Rapat koordinasi desa (rakordes) dan Mini lokakarya (minilok)                   |  | 20 kali        |
| 3  | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK   | Jumlah balai penyuluhan KKBPK yang dilakukan pengelolaan operasional dan sarannya  | 24 unit        |
| 4  | Pengendalian KKBPK   |  |                |
|    | Keg. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP   | 43%            |
| 1  | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                            | Jumlah Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang mendapatkan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB | 88 faskes      |
| 2  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Jumlah akseptor MKJP   | 2.700 akseptor |
| 3  | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP  | Jumlah kasus komplikasi dan kegagalan pemasangan alat kontrasepsi  | 8 kasus        |
| 4  | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB   | Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB tersedia  | 10 unit        |
| 5  | Pembinaan pelayanan keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitasi kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya  |  |                |
| 6  | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan  | Jumlah frekuensi pembinaan kelompok remaja   | 6 kali         |
| 7  | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak   | Jumlah frekuensi pelayanan KB Bergerak menggunakan mobil unit pelayanan  | 5 kali         |
| II | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)   |  |                |
|    | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina   | 80%            |
| 1  | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                | Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang terbeli                | 15 unit        |
| 2  | Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) |  |                |

|   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| 3 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional   | 15 kelompok |
| 4 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Jumlah frekuensi Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 5 kali      |
|   | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                         | presentase linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKS  | 40%         |
| 1 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Frekuensi pembinaan kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKL,BKR,UPPKS) bersama mitra kerja/ormas   | 3 kali      |

| Kegiatan  | Anggaran                | Keterangan |
|---|-------------------------|------------|
| <b>1 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>  | <b>Rp 4.297.069.000</b> |            |
| Keg.Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal             | Rp 1.013.950.000        |            |
| 1 Pelaksanaan mekanisme operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakocam)  | Rp 338.000.000          | APBD       |
| Rapat koordinasi desa (rakordes) dan  |                         |            |
| 2 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK  | Rp 595.950.000          | APBD       |
| 3 Pengendalian KKBPK  | Rp 80.000.000           | APBD       |
| Keg.Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota        | <b>Rp 3.283.119.000</b> |            |
| 1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan | Rp 84.600.000           | APBD       |
| 2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | Rp 2.787.204.000        | APBD       |
| 3 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP   | Rp 10.000.000           | APBD       |
| 4 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  | Rp 203.615.000          | APBD       |
| 5 Pembinaan pelayanan keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya              | Rp 152.700.000          | APBD       |
| 6 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan                     | Rp 25.000.000           | APBD       |
| 7 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak  | Rp 20.000.000           | APBD       |

|    |  |    |                |                            |
|----|--|----|----------------|----------------------------|
| II | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN<br>PENINGKATAN KELUARGA<br>SEJAHTERA (KS)   | Rp | 6.657.800.000  |                            |
|    | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga<br>melalui Pembinaan Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga  | Rp | 6.651.800.000  | DAK Fisik dan Non<br>Fisik |
| 1  | Pengadaan Sarana Kelompok<br>Kegiatan Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,<br>BKL, PPPKS, PIK-R dan<br>Pemberdayaan Ekonomi<br>Keluarga/UPPKS)   | Rp | 360.000.000    | APBD                       |
| 2  | Penyediaan Biaya Operasional bagi<br>pengelola dan pelaksana (kader)<br>ketahanan dan Kesejahteraan keluarga<br>(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan<br>pemberdayaan ekonomi<br>keluarga/UPPKS)                                  | Rp | 6.237.300.000  | DAK Fisik dan Non<br>Fisik |
| 3  | Penyediaan Biaya Operasional bagi<br>Kelompok Kegiatan Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,<br>BKL, PPPKS, PIK-R dan<br>Pemberdayaan Ekonomi<br>Keluarga/UPPKS)  | Rp | 35.000.000     | APBD                       |
| 4  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok<br>Kegiatan Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,<br>BKL, PPPKS, PIK-R dan<br>Pemberdayaan Ekonomi<br>Keluarga/UPPKS)  | Rp | 19.500.000     | APBD                       |
|    | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran<br>Serta Organisasi Kemasyarakatan<br>Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota<br>dalam Pembangunan Keluarga Melalui<br>Pembinaan Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga                            | Rp | 6.000.000      |                            |
| 1  | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas<br>Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan<br>dalam Pengelolaan Program<br>Ketahanan dan Kesejahteraan<br>Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,<br>PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi<br>Keluarga/UPPKS) | Rp | 6.000.000      | APBD                       |
|    | Jumlah   | Rp | 10.954.869.000 |                            |

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan K  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

**Hi.NURYANTI, SKM**

Penata Tk. I

NIP. 19671112 198703 2 004

Pihak Pertama  
Koor Keluarga Berencana Ketahanan Kesejahteraan Kelua  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

**SRI SUNARTI, SKM, M.Si**

Pembina

NIP.19710129 199203 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pemuda selatan no 151 Klaten Utara Tlp. ( 0272 ) 321501 Fax 326201 kode pos 57424  
K L A T E N

PERJANJIAN KINERJA  
SUBKOOR PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FITRIYANI, SKM  
Jabatan : Subkoor Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten  
Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Hj. NURYANTI, SKM  
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten  
Selaku atasan langsung pihak kesatu selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

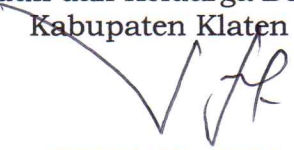
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, Januari 2023

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
Hj. NURYANTI, SKM  
Penata Tk. I  
NIP 19671112 198703 2 004

Pihak Kesatu  
Subkoor Pengendalian Penduduk  
Penyuluhan dan Penggerakan  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Klaten

  
FITRIYANI, SKM  
Penata  
NIP 19760811 200604 2 003



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN**

Unit Kerja : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No       | Program  | Indikator Kinerja  | Target               |
|----------|--|--|----------------------|
| 1        | 2  | 3  | 4                    |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>   |  |                      |
|          | Keg. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk         | Persentase kesesuaian kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 85%                  |
| 1        | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal  | Jumlah institusi pendidikan kerjasama kependudukan   | 2 institusi/ lembaga |
|          | Keg. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah   | Persentase Dokumen Data kependudukan dan KB tersusun   | 100%                 |
| 1        | Perumusan Parameter Kependudukan   | Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait penyusunan Dokumen Kebijakan terkait Kependudukan   | 2 kali               |
| 2        | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga   | Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait penyusunan Dokumen Profil kependudukan  | 2 kali               |
| 3        | Pengadaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB  |  |                      |
|          | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   |  |                      |
|          | Keg. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal                                     | Persentase kecamatan yang dilakukan Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)  | 100%                 |
| 1        | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja   | Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan mitra  | 5 kali               |
|          | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  | Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  | 100%                 |
| 1        | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | Jumlah frekuensi penggerakan kader   | 4 kali               |
|          | Keg. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Cakupan Kampung KB yang dilakukan pembinaan  | 82%                  |
| 1        | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB  | Jumlah lokasi pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK  | 26 lokasi            |

| Kegiatan  | Anggaran              | Keterangan  |
|---|-----------------------|-------------|
| <b>I PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>  | <b>Rp 672.670.000</b> |             |
| Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | <b>Rp 5.000.000</b>   |             |
| 1 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal   | Rp 5.000.000          | <b>APBD</b> |
| Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | <b>Rp 667.670.000</b> |             |
| 1 Perumusan Parameter Kependudukan  | Rp 2.500.000          | <b>APBD</b> |
| 2 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga  | Rp 474.970.000        | <b>APBD</b> |

|    |   |    |                      |      |
|----|---|----|----------------------|------|
| 3  | Pengadaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB   | Rp | 190.200.000          | APBD |
| II | <b>PROGRAM PEMBINAAN</b><br>KEJUJUBA BERENCANA (KB)   | Rp | <b>1.087.368.000</b> |      |
|    | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal                                     | Rp | <b>24.368.000</b>    |      |
| 1  | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja  | Rp | 24.368.000           | APBD |
|    | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   | Rp | 1.502.600.000        |      |
| 1  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   | Rp | 1.502.600.000        | APBD |
|    | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Rp | <b>1.063.000.000</b> |      |
| 1  | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB   | Rp | 1.063.000.000        | APBD |
|    | Jumlah  | Rp | <b>1.760.038.000</b> |      |

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

  
**Hj. NURYANTI, SKM**

Penata Tk. I

NIP. 19671112 198703 2 004

Pihak Pertama

Subkoor Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

  
**FITRIYANI, SKM**

Penata

NIP. 19760811 200604 2 003